



**PUTUSAN**  
**Nomor 5299/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5723/PJ/2019, tanggal 16 Desember 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk.**, beralamat di Sentral Senayan III Lantai 26, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh Thilagavathy Nadason dan Effendi, masing-masing selaku Direktur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Darneliwita, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Gani Djemat & Partners, Advocates/Solicitors, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-086498.16/2010/PP/M.XIV.B Tahun 2019, tanggal 18 September 2019, yang

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5299/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan kembali hasil perhitungan PPN beserta sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP untuk tahun pajak 2010 antara pihak Terbanding (SK-DJP) dan Banding dari Pemohon Banding:

No.	URAIAN	Cfm-SK DJP (Rp)	Cfm-Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor	-	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	7.073.676.570	4.434.110.107
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	727.272.727	727.272.727
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)	7.800.949.297	5.161.382.834
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	7.800.949.297	5.161.382.834
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva		
	d.1. Impor BKP	-	-
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	-	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	-	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak	-	-
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	-	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:		
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	707.367.657	443.411.010
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		
	b.3. STP (pokok kurang bayar)		
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	443.411.010	443.411.010
	b.5. Lain-lain		
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	443.411.010	443.411.010
	c. Diperhitungkan:		
	c.1. SKPPKP	-	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	443.411.010	443.411.010
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	263.956.647	-
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)	-	-
	c. Jumlah (a+b)	-	-
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)	263.956.647	-
5	Sanksi administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	126.699.191	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP		
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	126.699.191	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	390.655.838	-

- Bahwa berdasarkan perhitungan dalam Tabel di atas, Pemohon Banding mohon dapatlah kiranya Majelis yang terhormat mengabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Banding Pemohon Banding ini, sehingga jumlah PPN Kurang Bayar beserta Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP menurut SK-DJP Nomor KEP-2151/WPJ.19/2014, tanggal 20 Oktober 2014 yaitu kurang bayar sebesar Rp390.655.838,00 dapat disetujui menjadi Nihil sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding di atas;

- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Banding ini berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 08 Maret 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-086498.16/2010/PP/M.XIV.B Tahun 2019, tanggal 18 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2151/WPJ.19/2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor 00016/207/10/091/13, tanggal 1 Agustus 2013 Masa Pajak Februari 2010, atas nama PT Bank Internasional Indonesia, Tbk., NPWP 01.309.323.2-091.000, beralamat di Gedung Sentral Senayan III Lantai 26, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

(Rupiah)

1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.434.110.107,00
	- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	727.272.727,00
	Jumlah Penyerahan	5.161.382.834,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	443.411.010,00
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00
	- Dibayar dengan NPWP sendiri	443.411.010,00
	Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	0,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	0,00

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5299/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Sanksi administrasi:	
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Desember 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-086498.16/2010/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 18 September 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-086498.16/2010/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 18 September 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5299/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2151/WPJ.19/2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00016/207/10/091/13, tanggal 1 Agustus 2013, atas nama PT Bank Internasional Indonesia, Tbk., NPWP 01.309.323.2-091.000, beralamat di Gedung Sentral Senayan III Lantai 26, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00016/207/10/091/13, tanggal 1 Agustus 2013, atas nama PT Bank Internasional Indonesia, Tbk., NPWP 01.309.323.2-091.000, beralamat di Gedung Sentral Senayan III Lantai 26, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Februari 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5299/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2151/WPJ.19/2014, tanggal 20 Oktober 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor: 00016/207/10/091/13, tanggal 1 Agustus 2013, Masa Pajak Februari 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.309.323.2-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas DPP Penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri Masa Pajak Februari 2010 atas transaksi Murabahah sebesar Rp2.639.566.463,00 yang tidak dipertahankan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi atas DPP Penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri Masa Pajak Februari 2010 atas transaksi



Murabahah sebesar Rp2.639.566.463,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan sebagian oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan pemenuhan dan penuaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena (a) penjualan agunan kredit yang diambil alih (AYDA) adalah semata-mata merupakan bagian dari jasa perbankan yang dicatat sebagai *NR Other-Foreclosure Collateral* merupakan aset piutang dari debitur bukan sebagai aset tetap, di mana *objectum in litis* sebagai pemilik konsumen/debitur dan bukan penyerahan atas jasa yang terutang PPN atau AYDA tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), sedangkan transaksi Murabahah bertindak sebagai penyedia dana bagi nasabah yang membutuhkan BKP dari Pengusaha Kena Pajak (Penjual/*Supplier*) yang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sehingga *in casu* tidak termasuk penyerahan BKP yang terutang PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 4A ayat (3d) dan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 5d Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena merupakan pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5299/B/PK/Pjk/2020



Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.434.110.107,00
	- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	727.272.727,00
	Jumlah Penyerahan	5.161.382.834,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	443.411.010,00
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00
	- Dibayar dengan NPWP sendiri	443.411.010,00
	Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	0,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	0,00
5	Sanksi administrasi:	
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5299/B/PK/Pjk/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001